

## **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

**Satriyadi<sup>1</sup>, Putri Amanda Fadilla<sup>2</sup>, Ardina Khorunnisa<sup>3</sup>, Yesa Dwi Khairani<sup>4</sup>,  
Khairunnisa<sup>5</sup>, Nur Adilla<sup>6</sup>, Bunga Kesuma<sup>7</sup>, Khairina Habib Rangkuti<sup>8</sup>, Azmi Oktari  
Harahap<sup>9</sup>, M. Dzaky Labib<sup>10</sup>**

**<sup>1</sup> STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai**

**<sup>2-10</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Email: [Satriyadi@gmail.com](mailto:Satriyadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [Putriamandafdl@gmail.com](mailto:Putriamandafdl@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan nilai-nilai luhur, memahami konsep demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan pentingnya partisipasi aktif. Pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan membentuk generasi muda yang sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi dalam membentuk masyarakat yang demokratis.

**Kata kunci:** *Pendidikan Kewarganegaraan, Masyarakat Demokratis*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of civic education in forming a democratic and inclusive society. The research method used is literature study by collecting and analyzing relevant articles and books. The results of the study show that citizenship education helps students develop noble values, understand the concept of democracy, human rights and the importance of active participation. Democracy education in the context of civic education in Indonesia is needed to strengthen democratic values and form young people who are aware of their rights and obligations as citizens. This research contributes to understanding the importance of civic education and education in democracy to form a democratic society.*

**Keywords:** *Citizenship Education, Society Democratic*

## PENDAHULUAN

Masyarakat demokratis merupakan cita-cita yang diidamkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan berada di tangan rakyat, dan setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang inklusif dan adil, penting bagi setiap warga negara untuk memahami konsep dan prinsip demokrasi serta berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat demokratis adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk jati diri warga negara yang sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka serta memiliki nilai-nilai yang mencerminkan budaya bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dapat mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan juga tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara, tetapi juga harus mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan kebebasan berpendapat menjadi topik yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan memahami dan memiliki kesadaran terhadap isu-isu ini, individu dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis. Namun, mewujudkan masyarakat demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan dan masalah yang perlu dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep demokrasi, rendahnya partisipasi politik, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan para pendidik untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat yang demokratis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan metode studi perpustakaan (*Library Research*) yang melibatkan penjelasan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian tentang Mewujudkan Masyarakat Demokratis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan literatur yang relevan dan mempelajarinya secara mendalam, serta melakukan diskusi untuk membahas konten yang terkait dengan materi yang ada dalam buku tersebut agar dapat menyusun artikel ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel terkait dari sumber-sumber terpercaya. Pemilihan sumber data harus berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kemutakhiran informasi. Dalam penulisan ini, analisis data akan dilakukan melalui dua tahap: tahap pemilihan dan tahap analisis isi. Pada tahap pemilihan, data yang relevan akan diidentifikasi dan dipilih dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kemudian, pada tahap analisis isi, data yang terpilih akan dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan pendekatan multidisipliner yang muncul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur dan moral yang berlatar belakang pada budaya bangsa, yang diharapkan dapat membentuk suatu jati diri yang diwujudkan sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Sumarsono et al., 2005).

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian (Zulfikar & Dewi, 2021).

Selain didasarkan pada konstitusi negara, Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Hal ini mencakup isu-isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai mahasiswa dan warga negara muda, penting bagi mereka untuk memahami dan memiliki kesadaran serta partisipasi aktif terhadap isu-isu tersebut guna mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Peran pendidikan kewarganegaraan adalah membina generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Para generasi penerus memiliki peran penting sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik (generasi penerus) diberikan pemahaman dan pengalaman yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme serta nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air, menghargai kebudayaan bangsa, memiliki wawasan nusantara, serta memiliki ketahanan nasional (Izma & Kesuma, 2019).

Berikut ini adalah peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mewujudkan masyarakat demokratis (Dewi & Ulfiah, 2021):

1. Membina Warga Negara yang Baik: PKn bertujuan untuk membina generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui PKn, peserta didik diberikan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang penting untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam kehidupan demokratis.
2. Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara: PKn memiliki peran dalam menanamkan kesadaran bela negara pada generasi penerus. Hal ini penting agar mereka memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air serta siap mempertahankan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
3. Peningkatan Nasionalisme: PKn memberikan pemahaman dan peningkatan sikap serta tingkah laku yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya

bangsa. Dengan demikian, PKn membantu meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik, sehingga mereka menghargai keberagaman dan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

4. Menyadarkan akan Tugas dan Peran sebagai Pemimpin Bangsa: PKn mempersiapkan generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami, menganalisis, dan menjawab tantangan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Membentuk Kecakapan Partisipatif dan Bertanggung Jawab: PKn bertujuan untuk membentuk kecakapan partisipatif yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat. Melalui PKn, peserta didik diajarkan untuk memiliki pemikiran komprehensif, analitis, kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan.
6. Mengembangkan Budaya Demokrasi: PKn memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya demokrasi di masyarakat. PKn membantu menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan, yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.
7. Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Moral: PKn juga bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki keterampilan sosial dan moral. Dengan penanaman moral dan keterampilan sosial, peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, siap menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan, seperti toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralitas, kepatuhan terhadap hukum, serta pengembangan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
8. Mewujudkan Tujuan Nasional: PKn berperan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Melalui PKn, generasi penerus diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, serta konsisten dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan para generasi penerus bangsa Indonesia mampu memahami, menganalisis, dan menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk generasi penerus yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang demokratis.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang bertindak sebagai pembuat keputusan dan kebijakan tertinggi dalam menjalankan negara dan pemerintahan, serta memiliki kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili mereka. Dalam sistem demokrasi, negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan mayoritas rakyat, sambil tetap memperhatikan hak-hak kaum minoritas dan tidak mengesampingkannya (Wasiyem et al., 2021).

Pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang teratur atau sistematis yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya yang sistematis demi membangun kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu peran pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangat diperlukan, karena dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan seseorang bisa paham tentang apa itu negara demokratis dan bagaimana menjadi masyarakat demokratis. Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam dua hal yaitu: "*school-based deomecracy education*" dan "*society-based deomecracy education*". "*School-based deomecracy education*" merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal sedangkan "*society-based deomecracy education*" merupakan

pendidikan demokrasi yang tidak formal atau yang berbasis di kehidupan masyarakat (Nadziroh, 2015).

Dalam demokrasi pendidikan terdapat prinsip-prinsip diantaranya menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia berdasarkan dengan nilai luhurnya, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur, serta mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan setiap individu tanpa merugikan orang lain (Khuzaimah & Pribadi, 2015).

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokratisasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan hak-hak sebagai kewarganegaraannya. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang *civil society* termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Dahl yang menjelaskan bahwa hal yang paling menentukan di dalam sistem demokrasi adalah bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan hak-hak fundamental seperti adanya kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye kampanye pemilihan (Nasution, 2016).

Dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap demokrasi, melalui pendidikan demokrasi yang komprehensif dan pendidikan kewarganegaraan yang kuat, diharapkan Indonesia dapat memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi serta membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan demokrasi menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, mampu berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, dan

menghormati keberagaman serta hak asasi manusia. Melalui upaya ini, Indonesia dapat menuju pada perwujudan sebuah masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berdaya saing dalam konteks global.

Tanpa adanya kehidupan yang demokratis, asas kedaulatan rakyat tidak dapat berfungsi, dan keberadaan jaminan Hak Asasi Manusia serta persamaan di hadapan hukum menjadi tidak terjamin. Jika hal tersebut terjadi, maka upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila akan semakin menjauh. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep demokrasi ini. Dengan pemahaman yang cukup tentang konsep demokrasi, masyarakat dapat aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga dapat menjadi penjaga dan pengawal demokrasi, memastikan agar nilai-nilai demokrasi terus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan diatas:

1. Peran PKn dalam mewujudkan masyarakat demokratis:
  - Membina Warga Negara yang Baik
  - Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara
  - Peningkatan Nasionalisme
  - Menyadarkan akan Tugas dan Peran sebagai Pemimpin Bangsa
  - Membentuk Kecakapan Partisipatif dan Bertanggung Jawab
  - Mengembangkan Budaya Demokrasi
  - Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Moral
  - Mewujudkan Tujuan Nasional
2. PKn bertujuan untuk membina generasi penerus yang:
  - Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam kehidupan demokratis
  - Mempunyai rasa cinta terhadap tanah air
  - Menghargai keberagaman dan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia



- Memahami, menganalisis, dan menjawab tantangan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara
3. PKn membantu:
- Menanamkan nilai-nilai demokrasi
  - Membentuk kecakapan partisipatif yang berkualitas dan bertanggung jawab
  - Meningkatkan keterampilan sosial dan moral
  - Memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan
  - Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia
4. Tujuan PKn dalam mengembangkan generasi penerus:
- Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara
  - Mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis

Dengan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan generasi penerus mampu berperan aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara, dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang demokratis.

## REFERENSI

- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 499–506. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34152>
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(1), 84–92. <https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/2419>
- Khuzaimah, & Pribadi, F. (2015). Penerapan Demokrasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 4(1). <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ALMAARIEF/article/view/2176>
- Nadziroh. (2015). Membangun Masyarakat Demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Trihayu*, 2(1). <https://www.neliti.com/publications/259039/membangun-masyarakat-demokratis-melalui-pendidikan-kewarganegaraan>
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2).

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/5167>

Sumarsono, Mansyur, H., Tjiptadi, & Sobana, A. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Cet. 6). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wasiyem, Purba, H., & Kaulan Karima, M. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: CV Merdeka Kreasi Grup.

Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115.

<http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1171>